TEMPO.CO

GULA-GULA DUA SAUDARA

Pabrik gula milik PT Prima Alam Gemilang, anak usaha Jhonlin Group, di Bombana, Sulawesi Tenggara. TEMPO

ATAS nama swasembada gula untuk menutup defisit kebutuhan 1,1 juta ton setahun. pemerintah mengundang pengusaha berinvestasi membuka kebun tebu dan pabrik pengolahnya. Dari 10 lokasi di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Salah satu yang terbesar di Bombana, Sulawesi Tenggara. Pemegang konsesinva Andi Syamsuddin Arsyad, pengusaha batubara, sepupu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan wakil bendahara tim pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Amran turun langsung mengurus perizinan hingga kabupaten, yang menabrak tata ruang dan program kementeriannya sendiri.

DENGAN gerak geriknya yang kikuk, laki-laki berbaju cokelat itu secara canggung meminta *Tempo* menghapus foto-foto dalam kamera telepon. "Kalau bisa dihapus karena sebetulnya wartawan tidak boleh masuk kesini," katanya.

Ia mengenalkan diri sebagai Tuji. Brigadir Tuji. Sehari-hari dia bertugas di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari, 150 kilometer jauhnya dari tempat ia meminta *Tempo* menghapus foto-foto aktivitas para penambang emas di area PT Sultra Utama Nikel, di Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, pada pertengahan agustus 2019.

Di area penambangan emas itu, Tuji menjadi penanggung jawab. "Kantor"-nya rumah berdinding kayu di tengah sabana. Para penambang memanggilnya "bos". "Padahal saya cuma disuruh komandan berjaga disini," ujar Tuji.

Sampai percakapan itu berlangsung, puluhan penambang emas dengan pakaian berlumpur-lumpur keluar-masuk rumah yang menjadi markas, tempat istirahat, sekaligus warung makan tersebut. Tuji "bertugas" mengawasi para penambang yang baru datang ke Rarowatu Utara empat bulan lalu, setelah Jhonlin Group membeli saham PT Sultra Utama Nikel pada Maret 2019.

Jhonlin tak punya izin menambang emas. PT Jhonlin Batu Mandiri, anak usaha Jhonlin Group yang berdiri pada 2014, adalah pemegang konsesi perkebunan tebu. Perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad, yang lebih populer dipanggil Haji Isam, itu mendapat konsesi 20 ribu hektare untuk ladang tebu dan pabrik gula di Bombana selama 10 tahun. Isam berasal dari Desa Mappasangka di Bone, Sulawesi Selatan.

Menurut mantan Kepala Desa Mappasengka, Andi Rasdi Sumange, Isam terhitung sepupu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pada 2017, Amran bersama Isam datang ke pesra rakyat di desa itu yang menghadirkan para penyanyi Ibu Kota. Amran menyumbang Rp 100 juta untuk pembangunan masjid, sementara Isam menghibahkan Rp 500 juta.

Proyek kebun tebu dan pabrik gula itu adalah hajat besar Kementerian Pertanian untuk swasernbada gula 2024. Program ini merupakan permintaan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada 2016. Menteri

Amran menerjemahkan perintah itu dengan membuka investasi ladang tebu dan pabrik gula untuk menutup kebutuhan 3,9 juta gula konsumsi yang deflsit 1,1 juta ton setahun.

Menurut Mochamad Arif Efendi, Direktur Jhonlin Batu Mandiri, area konsesi PT Sultra Nikel seluas 2.344 hektare itu akan diubah menjadi kebun tebu setelah izin usaha pertambangannya habis tahun depan. Di halaman "kantor" Brigadir Tuji itu terparkir alat-alat berat pengeruk tanah dan mobil pengerek roda empat.

Konsesi menambang emas PT Sultra dimulai pada 2010. Haji Isam membeli semua saham PT Sultra senilai Rp 29,48 miliar. Laban di sekeliling kantor PT Sultra di Desa Watu-Watu kini sudah tertanam tebu setinggi orang dewasa. "Nanti semua lahan akan ditanami tebu," kata Arif Efendi.

Selain membeli saham PT Sultra, Haji Isam membeli saham PT Cahaya Gemilang Sentosa, yang memiliki konsesi pertambangan emas 5.346 hektare di Poleang Utara, satu wilayah desa dengan konsesi PT Sultra. Para penambang, umumnya datang dari Palopo, Sulawesi Selatan, mengaku mendapat upah Rp 90 ribu per hari dari polisi daerah Sulawesi Tenggara.

Emas adalah komoditas favorit Bombana satu dekade terakhir. Ada sekitar 30 perusahaan yang menambang di sana, termasuk PT Titan Indonesia, perusahaan milik Menteri Amran Sulaiman, seluas 947 hektare di Rarowatu sejak 2014.

Karena emas mulai surut, para penambang mengaku tak menentu mendapatkannya tiap hari. Para penambang ataupun Brigadir Tuji mengaku tak tahu pembeli akhir emas yang ditambang di sabana itu. "Saya tidak punya hak bicara," kata polisi asal Klaten, Jawa Tengah, ini.

Kepala Kepolisian Resor Bombana Ajun Komisaris Besar Andi Adnan Syafruddin menyangkal kabar bahwa anak buahnya menambang di area PT Jhonlin. Begitu pula jawaban juru bicara Polda Sulawesi Tenggara, Ajun Komisaris Besar Harry Goldenhardt. " Tidak ada perintah untuk menambang," katanya. "Kalau ada, silakan laporkan ke Divisi Profesi dan Keamanan."

Arif Efendi menolak mengomentari polisi yang menambang di lahannya. "Ini di luar tugas saya," ujarnya. Sedangkan Haji Isam meminta Tempo melaporkan para polisi itu ke Divisi Profesi dan Keamanan. Soalnya, kata dia, keberadaan para penambang itu membuat perusahaannya dituding mengincar emas berkedok izin kebun tebu. "Sama sekali saya tidak tahu ada emas," ucapnya.

Isam menyebutkan ia ikut mengajukan diri membuka kebun tebu di Bombana karena ingin membantu pemerintah mewujudkan swasembada gula. Kendati tak punya pengalaman berbisnis tebu atau gula, ia bersedia menyediakan uang tunai sebagai syarat investasi.

Syahdan, setelah rapat kabinet 2016 memutuskan target swasembada gula pada 2020, Menteri Amran Sulaiman membuka peluang investasi di 10 lokasi. Ada 300 perusahaan yang tertarik. Setelah disaring, jumlahnya tinggal 28. "Setelah disaring lagi, tinggal sepuluh," kata Amran. Total produksi gula kristal putih semua perusahaan itu 1,1 juta ton setahun.

Nilai impor gula pada 2018 mencapai 5,02 juta ton, yang nilainya USS 1,79 miliar atau sekitur Rp 26,8 triliun. Jika merujuk pada data 2016, kebutuhan gula nasional sebanyak 5,7 juta ton, yang terbugi untuk industri 2,9 juta ton dan sisanya gula konsumsi. Sedangkan produksi dalam negeri untuk dua kebutuhan itu hanya 2,2 juta ton.

Syarat utama perusahaan terpilih membangun pabrik gula, menurut Amran, adalah punya komitmen dengan menunjukkan garansi bank 20 persen dari nilai investasi tiup lokasi. Investasi PTJhonlin Batu Mandiri tercatat salah satu yang paling besar, senilai Rp 3,89 triliun, termasuk Rp 1,72 triliun untuk mendirikan pabrik. "Dia siap dengan uangnya," ucap Amran.

Menteri Amran menguku trauma terhadap janji investasi pabrik gula. Ia bercerita, investasi tebu di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, gagal karena tak ada keseriusan calon investor yang mengajukun diri. "Saya sebut perusuhaan seperti itu 'PT Akan-akan'," katanya. "Saya sudah bosan dengan perusahaan semacam itu."

Terdorong keinginan mewujudkan swasembada gula, Amran mengawal penuh proses perizinan perusahaan-perusahaan tersebut. Ada sepuluh lokasi yang dipilih, di antaranya Nusa Tenggara Burat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.

Hingga kini, perusahaan-perusahaan itu umumnya belum selesai membangun pabrik. “Pabrik kami baru 35 persen,” ujar Erwin Suryadi Setiawan, Head of Corporate Legal & Communication PT Muria Sumba Manis di Nusa Tenggara Timur. “Pabrik diperkirakan baru beroperasi juni 2020 dengan kapasitas giling 6.000 ton tebu sehari.” Dalam proposalnya, kapasitas giling Muria sebanyak 10 ribu ton.

Berbeda dengan sembilan perusahaan lain, perusahaan Isarn mendapat keistimewaan. Menteri Amran turut “membantu” mengurus izinnya hingga Bombana.

Wakil Bupati Bombana Johan Salim bercerita, Menteri Arman mengumpulkan semua pejabat kabupaten itu di Hotel Clarion, Kendari, pada pertengahan 2017. la membawa dan mengenalkan Isam sebagai calon investor yang akan membuka kebun tebu dan pabrik gula. “Kami diminta back up karena investasinya Rp 7 triliun,” kata Johan.

Selain menggelar penemuan terbuka di hotel, beberapa pejabat bercerita, Menteri Amran meminta mereka berkumpul di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang pintu ruang rapatnya dijaga polisi. Para peserta pertemuan dilarang membawa telepon seluler ke dalam ruangan. Amran kembali mengulang agar pemerintah daerah memuluskan izin investasi PT Jhonlin.

Amran membenarkan pemah mengumpulkan pejabat Sulawesi Tenggara membahas investasi Isam. Menurut dia, semua pejabat daerah setuju kehadirun Jhonlin. Arman kembali menegaskan agar perizinan luhun Jhonlin dipermudah untuk mempercepat perusuhaan beroperasi. “Saya kejar sampai bupati,” ujarnya.

Untuk perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Amran menugasi anggota staf khusus Menteri Penanian bidang investasi, Syukur Iwanturo. la menjabat Wakil Ketua Tim Percepatan Kerja Sama Pemanfuatan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. “Kami bahas semua proposal. Arahan beliau hams profesional,” kata Syukur. Pada Maret 2018, in naik jabatan menjadi Sekretaris jenderal Kementerian Pertanian.

Bukan hanya Syukur yang sibuk. Direksi PT jhonlin juga mendatangi Bupati Bombana Tafdil meminta penerbitan izin-izin dipercepat. Tafdil meresponsnya dengan mengeluarkan izin lokasi. “Saya juga ingin cepat,” ucap politikus Panai Amanat Nasional ini.

Tafdil melupakan rencananya pada 2012 yang akan menjadikan Bombana sebagai lumbung petemakan sapi. Ia tak peduli jika ladang penggembalaan Balanteo sudah dihuni 19 kelompok peternak dengan lebih dari 400 anggota yang mengurus 3.454 ekor sapi.

Di lahan seluas 11 ribu hektare itu, selain para peternak, penduduk sejumlah desa tinggal. Mereka mengembangbiakkan sapi karena mendapat hibah dari Kementerian Pertanian pada 2013, ketika Menteri Pertanian dijabat Suswono, sebesar Rp 3 miliar. Kini penduduk desa dan petemak diusir polisi atas suruhan PT Jhonlin.

Skema yang dipakai dalam penguasaan itu adulah kerja sama antara PT Jhonlin Batu Mandiri dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima Bombana. Dasarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

Dalam perjanjian itu disebutkan pemerintah provinsi akan mendaputkan komiisi dari produksi gula PT Jhonlin melalui skema bagi hasil. Hingga dua tahun setelah nota kerja sama diteken, persentase bagi hasil belum jelas benar. “Kumi musih menghitungnya,” kata Kepala KPHP Tina Orima Rustam.

Tak sampai sebulan, sejak Jhonlin terpilih dalam daftar 28 perusahaan pada 4 Juli 2017, izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kerja sama pernanfaatan hutan produksi terbit. Sebulan kemudian, 11 September 2017, nota kesepahaman Jhonlin dan KPHP Tina Orima ditandatangani kedua belah pihak. Arman Sulaiman dan Haji Isam menanam tebu pertama kali di Balanteo pada 1 Oktober 2017.

Ketua Tim Percepatan Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan Agus Justianto tak memungkiri jika izin perkebunan tebu Bombana disebut diberikun secara cepat. “Tugas tim sesuai dengan namanya: tim percepatan pencadangan lahan untuk pangan lintas instunsi,” ujar pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup ini. “ Tapi tidak semua cepat juga.”

Total lahan hutan produksi yang dikuasai PT Jhonlin, yang menggabungkan konsesi dan tambang emas perusahaan yang dibelinya, lebih dari 30 ribu hektare. Luas ini di luar kawasan hutan produksi terbutas 1.913

hektare melalui skema tukar-menukar lahan dengan KPHP Tina Orima. Di lahun inilah, kata Arif Efendi, kelak dibangun pabrik seluas 224 hektare.

Di atas kertas, kapasitas giling pabrik gula PT Jhonlin sebesar 12 ribu ton tebu sehari, yang menghasilkan 104.400 ton gula kristal putih setahun. Jika asumsi harga gula Rp 12.500 per kilogram, Jhonlin akan mendapat penghasilan Rp 1,3 triliun setahun.

Masalahnya, perkebunan tebu dam pabrik gula Jhonlin tak tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Bombana 2013-2030. Dalam RTRW yang disahkan Bupati Tafdil itu, area kebun tebu Jhonlin tercatat untuk ladang penggernbaluan karena hutan produksi tersebut berbentuk sabana. Karena itu, sejak 2013, padang ilalang ini dipakai untuk penggembalaan 3.454 sapi oleh 400 petemak.

Hibah Rp 3 miliar dari Kementerian Penanian pada 2013 suduh terpakai untuk membangun pusat kesehatan hewan, penangkaran, hingga kandang. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pakan Ternak Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan Sulawesi Tenggara, Pollynarius, mengatakan ladang penggembalaan itu menjadi kebanggaan Bumbana. “Sekarang karni tidak punya kebanggaan lagi,” ucapnya.

Ketika RTRW itu dikonfirmasi kepada Tafdil, sang Bupati mengatakan perkebunan tebu dan pabrik gula sudah sesuai dengan perencanaan. la menampik semua pasal yang menyebutkan ladang penggembalaan. “Izin lokasi untuk tebu itu sudah dibahas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah,” katanya. “Jadi tak mungkin tak sesuai dengan tata ruang.”

Dalam RTRW Sulawesi Tenggara 2014-2034 pun tak ada frasa perkebunan tebu untuk Bombuna. Industri gula dan kebun tebu disebutkan dalam pasal 40, tapi berlokasi di Konawe Selatan dan Muna. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara Yesna Suarni membenarkan ketiadaan tebu dalam rencana tata mung Bombana. “Masyarakat tidak pemah mengembangkan komoditas itu,” katanya. Yesna dicopot dari jabatannya pada akhir Agustus lalu.

Bahkan, dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Tina Orima yang ditetapkan Juli 2016, konsesi Jhonlin berada di blok penggunaan untuk pertambangan. Untuk memuluskan rencana Jhonlin, KPHP Tina Orima merevisi RPHJP pada Desember 2017, atau dua bulan setelah Amran menanam tebu Jhonlin, dari status blok penggunaan menjadi zona pemanfaatan. Padahal RPHJP biasanya direvisi tiap 10 tahun.

Perubahan status itu membuat Jhonlin terlihat sah menanam tebu. Kepala KPHP Tina Orima Rustam mengatakan revisi rencana jangka panjang urusan dinas kehutanan provinsi. “RPHJP direvisi karena izin pertambangan beberapa perusahaan sudah mau habis,” ujar Sahid, Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara.

Pernyataan Sahid berbeda dengan Pollynarius. Menurut pejabat Dinas Peternakan Sulawesi Tenggara itu, tanah di lokasi konsesi Jhonlin tak cocok untuk kebun tebu. Di lapangan terlihat tebu tak turnbuh dengan mulus karena lapisan tanahnya berupa mineral.

Direktur Jhonlin Arif Efendi mengakui pada awalnya ia kesulitan menanam tebu karena tanahnya minim hara. “Rumput saja tidak tumbuh,” tuturnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengakui ketidakcocokan itu. Namun ia mengklaim tanah di Balanteo kini subur setelah lapisan mineralnya diangkat.

Di tanah subur sekalipun pabrik gula tak akan beroperasi maksimal dalarn waktu singkat. Manajemen PT Jhonlin berhitung, dengan kondisi Bombana seperti sekarang dan kualitas tebu yang masih rendah, produksi puncak gula baru tercapai dalam beberapa tahun. Dalam perhitungun Arif Efendi, “Balik modal baru tahun kesembilan jika hanya mengandalkan tebu lokal.” Padahal konsesi Jhonlin membuka kebun tebu hanya 10 tahun.

Walhasil, sebagai kompensasi, kata Arif, pemerintah menjanjikan kuota impor 600 ribu ton *raw sugar* untuk 10 pabrik gula itu. Kementerian Perindustrian tengah menggodok bagi-bagi kuota ini untuk mereka. “Sebagai insentif untuk pubrik gula buru berbasis tebu,” ujar Abdul Rochim, Direktur Jenderal Industri Agro.

Dasarnya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2017. Di sana disebutkan bahwa jatah impor untuk perusahaan di luar Jawa selama tujuh tahun dan pabrik di Jawa lima tahun. Menurut Rochirn, pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan karena membuka kebun tebu dan pabrik gula butuh waktu lama dan biaya besar. “Besaran impor berupa selisih kebutuhan gula konsumsi dan produksi dalam negeri,” katanya. (Sumber: Majalah Tempo edisi 7 September 2019)